

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam *Glossary of Environment Statistics* dijelaskan bahwa “*The environment is the totality of all the external conditions affecting the life, development and survival of an organism*” (UNSD, 1997). Berdasarkan definisi tersebut, maka lingkungan hidup memiliki keterkaitan yang erat terhadap kehidupan, perkembangan dan kelangsungan hidup setiap makhluk di bumi. Dengan kata lain, hubungan antara manusia, hewan maupun tumbuhan, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Bahkan, keanekaragaman satwa di bumi menjadi salah satu kekayaan alam terpenting bagi dunia. Satwa liar harus tetap dibiarkan berada pada habitatnya. Sebab, hal ini menjadi sebuah bagian dari menjaga ekosistem hutan, lingkungan tempat satwa liar. Dalam studi Hubungan Internasional, isu lingkungan menjadi salah satu isu yang penting setelah isu keamanan internasional dan ekonomi global. Terlebih lagi isu lingkungan menjadi sebuah metafora *tragedy of common* yang sangat perlu untuk dibicarakan dalam forum internasional sebab dampak bencana atau tragedi lingkungan di suatu wilayah akan menyebar dan menyebabkan bencana bagi semua pihak.

Berkaca dari pentingnya isu lingkungan hidup, maka dibuatlah sebuah perjanjian yang dapat menjamin stabilitas proses sistem secara keseluruhan dan meningkatkan kualitas ekosistem sehingga dapat berkelanjutan. Salah satunya yakni *Convention on International Trade in Endangered Species* (CITES) yang

mana menjadi perjanjian internasional yang beranggotakan 183 negara yang menetapkan perlindungan bagi tumbuhan dan hewan. Meski CITES telah ditetapkan dan menjadi tolak ukur dalam kegiatan perdagangan terhadap tumbuhan dan satwa liar, kebanyakan kejahatan terhadap lingkungan dan satwa liar tidak dianggap sebagai kejahatan yang serius. Menurut laporan oleh kelompok konservasi WWF, dunia telah kehilangan lebih dari dua pertiga populasi satwa liar dalam waktu kurang dari 50 tahun (Briggs, 2020). Berkaca dari fakta yang ada, maka disukai atau tidak, adanya perburuan dapat menyebar ke berbagai negara dan menjadikan satwa liar semakin berada dalam keadaan yang rentan kepunahan. Perburuan inilah yang memicu berkembangnya kegiatan perdagangan terhadap satwa liar di dunia. Jika melihat dari tujuan diadakannya kegiatan perburuan, hasil yang didapatkan tersebut tidak hanya untuk tujuan konsumsi pribadi dan masyarakat, namun juga untuk kecantikan, obat bahkan gengsi semata. Perburuan satwa liar untuk kebutuhan gengsi semata inilah disebut sebagai *Trophy Hunting*.

Seorang ahli zoologi, aktivis sekaligus penulis yakni Mark Carwardine dalam artikelnya di *Discover Wildlife* menjelaskan bahwa “*Trophy hunting is the shooting of carefully selected animals – frequently big game such as rhinos, elephants, lions; pumas and bears – under official government licence, for pleasure*” (Discover Wildlife, 2021). Menurut *International Fund for Animal Welfare* (IFAW), kegiatan *trophy hunting* merupakan salah satu bentuk perburuan yang tujuan eksplisitnya adalah untuk mendapatkan bangkai atau bagian tubuh dari binatang buruan tersebut yang digunakan sebagai piala pelambang keberhasilan berburu (Casamitjana & Tsang, 2016:6). Kegiatan ini dilakukan dengan membayar

senilai yang telah ditetapkan negara terkait yang mana biaya tersebut mencakup lembaga pemerintah, pakaian berburu, *tour guide*, perusahaan pelayaran yang akan mengirimkan pialanya, dan beberapa pihak lainnya. Selanjutnya, para pemburu tersebut akan menguntit dan membunuh hewan liar dengan senjata atau busur untuk mendapatkan bagian dari hewan sebagai piala keberhasilan perburuan. Tidak sedikit negara yang melihat keuntungannya dan menjadikan kegiatan ini dilegalkan atau diberikan izin oleh pemerintah. Mengutip dari *Griffth News* bahwa beberapa negara di Afrika seperti Tanzania, Zambia, Afrika Selatan, Zimbabwe, Namibia dan Mozambique tetap melegalkan kegiatan perburuan terhadap singa Afrika meskipun mendapatkan perdebatan dari berbagai negara (Hutchins, 2020). Menjadi salah satu negara yang melegalkan kegiatan ini, Zimbabwe memiliki persyaratannya sendiri yang mana para pemburu dikenai biaya untuk izin, transportasi, peralatan, pemandu dan biaya ekspor hewan sebesar \$ 5 untuk babon hingga \$ 11.000 untuk seekor gajah dengan berat lebih dari 60 pound (GPJ Zimbabwe, 2019).

Pada abad ke-20, kegiatan *trophy hunting* menjadi cukup terkenal dikalangan pemburu di Amerika maupun Eropa dan mulai dikaitkan dengan upaya konservasi. Sejalan dengan sejarah yang mengaitkan *trophy hunting* dengan konservasi, memunculkan banyak pihak yang mempercayai kegiatan ini sebagai sumber pendanaan potensial untuk konservasi, menciptakan insentif untuk melestarikan habitat dan ekosistem tempat berburu. Hal ini juga dijelaskan oleh Charles Darwin dan John James Audubon hingga Theodore Roosevelt dan Ernest Hemingway yang mana telah memandang diri mereka sebagai naturalis dan konservasionis dengan berkomitmen untuk keberlanjutan di antara populasi hewan

dan pelestarian kawasan liar yang mana menjadi kawasan perburuan mereka (Paterniti, 2017). Pendanaan kegiatan *trophy hunting* juga dimasukkan ke dalam perekonomian negara yang telah memberikan izin kegiatan ini berlangsung. Seperti yang dilansir dalam *Humane Society International*, adanya perburuan trofi menyumbang paling banyak sebesar 0,03 persen dari PDB dan paling banyak sebesar 0,76 persen dari pekerjaan pariwisata secara keseluruhan (Stapelkamp, 2021).

Meski begitu, penilaian positif yang dikembangkan tersebut telah dibantah oleh para kritikus yang berkecimpung dalam usaha penegakan hak satwa liar yang mana mengatakan bahwa adanya kegiatan berburu ini telah menyebabkan penurunan spesies langka dan menjadikannya terancam punah hingga pengelolaan dana kegiatan berburu yang justru memunculkan tindakan korupsi. Salah satu yang tidak mendukung anggapan positif dari *trophy hunting* adalah Johnny Rodrigues, Ketua Gugus Tugas Konservasi Zimbabwe yang mana mengatakan bahwa Johnny tidak mempercayai adanya perburuan trofi memberikan manfaat bagi masyarakat Zimbabwe, satwa liar ataupun taman nasional (Caldwell, 2015). Mengutip dari *Discover Wildlife* bahwa para pemburu tersebut memang mengeluarkan uang dalam jumlah besar namun uang tersebut justru mengarah pada elit pemburu dan pejabat pemerintah yang korupsi sebanyak 97 persen (Discover Wildlife, 2021).

Dalam perkembangannya ratusan ribu satwa liar, termasuk spesies langka atau terancam punah, dibunuh oleh para pemburu trofi setiap tahunnya. Berdasarkan data yang ada, Tanzania, Zimbabwe, Botswana dan Afrika Selatan merupakan negara dengan tingkat pembunuhan hewan akibat perburuan terbesar di

Afrika (Statista, 2015). Bahkan grup industri perburuan yang berbasis di AS, *Safari Club International* telah melakukan promosi secara berkala untuk melakukan perburuan satwa liar sebagai bentuk olahraga dengan tawaran kesempatan bersaing memenangkan hampir 50 penghargaan atas pembunuhan hewan di seluruh dunia. Pada akhirnya kegiatan ini berujung pada perdagangan satwa liar yang mana dari beberapa negara di dunia terdapat lima negara pengeksport teratas untuk penjualan trofi yakni Afrika Selatan, Mozambik, Namibia dan Zimbabwe serta Kanada (Humane Society International, 2016). Dengan fakta dan perdebatan yang ada mengenai *trophy hunting*, maka penelitian ini berusaha untuk menjawab bagaimana implikasi kegiatan *trophy hunting* melalui pendekatan poskolonialisme terhadap kerusakan ekologi satwa liar di Zimbabwe. Dikarenakan adanya kesulitan dalam proses pengumpulan data maka penelitian ini secara khusus lebih mengarah pada kasus perburuan gajah Afrika di Zimbabwe.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis telah merumuskan masalah yang dijelaskan serta dianalisis dalam tulisan ini ialah “Bagaimana implikasi kegiatan *trophy hunting* melalui pendekatan poskolonialisme terhadap kerusakan ekologi satwa liar di Zimbabwe?”

1.3. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan atau pelebaran pokok masalah agar penelitian ini dapat lebih terarah dan memudahkan pembahasan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dengan baik. Penelitian ini fokus pada informasi seputar perburuan gajah Afrika di

Zimbabwe dengan rentan waktu sejak 2015 hingga 2021. Namun tidak menutup kemungkinan satwa liar lainnya akan dibahas dalam skripsi ini dalam rangka mendukung data-data di penelitian.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang dapat dibedakan menjadi dua, yakni tujuan umum dan tujuan khusus:

1.4.1. Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memahami dan mengetahui bagaimana kegiatan *trophy hunting* memiliki dampak yang berbanding terbalik dengan apa yang telah dipahami banyak pihak sebelumnya.

1.4.2. Tujuan Khusus

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana implikasi kegiatan *trophy hunting* melalui pendekatan poskolonialisme terhadap kerusakan ekologi satwa liar di Zimbabwe.

1.5. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh kegunaan sebagai berikut:

1.5.1. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap pengetahuan tentang bentuk kegiatan yang merusak ekologi satwa liar yang mana disebabkan oleh manusia.

1.5.2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu organisasi yang berkecimpung dalam kegiatan perburuan, organisasi yang melindungi hak-hak satwa liar serta pemerintah di berbagai negara untuk mempertimbangkan pentingnya menghentikan kegiatan *trophy hunting* guna melestarikan ekosistem satwa liar.

1.5.3. Kegunaan Sosial

Selain kegunaan akademis dan kegunaan praktis, diharapkan penelitian ini juga memiliki kegunaan sosial berupa pemberian pemahaman bagi masyarakat bahwa *trophy hunting* tidak memberikan manfaat bagi kelestarian satwa liar khususnya di Zimbabwe.

1.6. Kerangka Penelitian

Penulisan mengenai *trophy hunting* sudah diteliti oleh banyak pihak. Berdasarkan literatur jurnal milik Never Muboko, Pardon Dube, dkk, yang berjudul “*Trophy quality trends and hunting effort of selected big game in Chewore South Safari Area, northern Zimbabwe, 2009-2012*”, dijelaskan terkait sistem perburuan di *Chewore South Safari Area (CSSA)* yang dilihat dari pola kualitas trofi dan upaya perburuan gajah, kerbau, macan tutul dan singa selama periode 2009-2012. Hasil studi mencatat bahwa terjadi penurunan kualitas berdasarkan ukuran trofi pada perburuan gajah. Sedangkan dalam periode yang sama, kerbau, macan tutul dan singa tidak terjadi penurunan kualitas trofi (Muboko, Dube, Mashapa, Ngosi & Gandiwa, 2020). Dengan menekankan pada hasil yang baik dalam perburuan gajah, para pemburu professional tetap membenarkan perburuan trofi di CSSA dengan

anggapan bahwa hal ini sangat diperlukan dalam menjunjung keberhasilan konservasi dan kontribusi bagi ekonomi lokal.

Kemudian, menurut literatur Victor K. Muposhi, Edson Gandiwa, dkk, yang berjudul "*Trophy Hunting, Conservation, and Rural Development in Zimbabwe: Issues, Options, and Implications*", menjelaskan tentang *trophy hunting* yang dinilai dari perspektif orang Zimbabwe dengan menekankan permasalahan pada evolusi perburuan trofi dan kebijakan terkait administrasi dan tata kelola perburuan trofi, signifikansi perburuan trofi dalam membiayai konservasi dan tantangan yang muncul dalam industri ini (Muposhi, Gandiwa, Bartels, & Makuza, 2016). Dalam tulisannya, didapati bahwa kebijakan perburuan trofi dan konservasi di Zimbabwe terus mengalami perkembangan sebagai tanggapan terhadap kebutuhan lokal dan internasional. Demikian pula, tata kelola perburuan trofi yang ikut berkembang seiring dengan berjalannya waktu, meskipun masih diperlukan kerangka kelembagaan yang kuat untuk mempertahankan integritas industri perburuan trofi yang berkelanjutan. Bukan hanya kelembagaan, sistem administrasi dan tata kelola juga terlihat lemah serta kurangnya kapasitas dan pembiayaan untuk perencanaan, pemantauan, dan pelaporan untuk pengelolaan yang adaptif. Selain itu, tulisan ini juga memberikan rekomendasi tindakan yang dapat digunakan bagi pemerintah Zimbabwe.

Selanjutnya, menurut P.A Lindsey, P.A. Roulet dan S.S. Romanach dalam tulisannya yang berjudul "*Economic and conservation significance of the trophy hunting industry in sub-Saharan Africa*" mengatakan bahwa perburuan trofi adalah industri utama di beberapa bagian Afrika yang semakin berkembang luas sehingga

dapat berperan dalam konservasi. Namun, saat ini, peranan tersebut dibatasi oleh serangkaian masalah yang umum terjadi di banyak negara seperti kegagalan untuk mengalokasikan manfaat yang memadai kepada masyarakat, pengaturan kuota, kegiatan korupsi dan beberapa masalah lainnya (Lindsey, Roulet, & Romanach, 2007).

Berdasarkan jurnal Mucha Mkono yang berjudul “*Neo-colonialism and greed: Africans’ views on trophy hunting in social media*”, menyatakan bahwa sebagian besar penentangan terhadap *trophy hunting* berasal dari orang-orang yang jauh dari masalah atau tanpa memiliki pengalaman secara langsung di Afrika. Sehingga sangat diperlukan pendapat dari masyarakat Afrika yang telah mengetahui kondisi yang ada untuk melihat pengaruh dari perburuan trofi (Mkono, 2019). Artikel ini juga telah mengungkapkan keterkaitan yang kuat antara persepsi perburuan trofi dengan sejarah kolonial Afrika. Perburuan trofi ini telah dipandang sebagai kegiatan yang condong pada politik di mana sumber daya satwa liar Afrika seakan-akan telah dijarah oleh kaum Barat dan dibantu oleh para pemimpin Afrika yang tamak. Selain itu, penting untuk tetap memantau bentuk-bentuk pariwisata konsumtif seperti *trophy hunting* baik dari segi ekonomi maupun integritas moral dan perspektif masyarakat lokal.

Dalam beberapa penelitian sebelumnya, mayoritas membahas mengenai kegiatan *trophy hunting* yang memang menghidupkan konservasi di berbagai negara. Namun kegiatan ini juga memiliki pengaruh bagi kehidupan satwa liar. Berdasarkan hal tersebut, pembeda dalam topik penelitian terdahulu dengan topik penelitian ini adalah usaha mengetahui bagaimana dampak negatif yang

ditimbulkan *trophy hunting* bagi ekologi satwa liar di Zimbabwe. Dampak yang ditimbulkan tersebut sangat beragam. Anggapan para pendukung perburuan yang menyatakan bahwa uang yang dihasilkan *trophy hunting* digunakan untuk mendanai lembaga konservasi satwa liar. Namun, realitanya justru sangat sedikit uang yang dihasilkan melalui kegiatan tersebut untuk konservasi. Alih-alih menargetkan hewan bermasalah, lemah dan banyak populasinya, pemburu trofi cenderung memilih hewan dengan sifat tertentu agar trofi yang dihasilkan berkualitas. Mayoritas memilih hewan besar, liar dan sedang dalam ambang kepunahan. Hal ini memberikan dampak yang serius bagi kelangsungan hidup populasi di masa depan. Kemudian, komunitas lokal juga sedikit yang mendapatkan keuntungan dari perburuan trofi. Berdasarkan data dari *the International Council for Game and Wildlife Conservation* dan *the UN Food and Agriculture Organisation*, menunjukkan bahwa perusahaan perburuan rata-rata hanya menyumbang sebesar 3% dari pendapatan untuk diberikan kepada masyarakat yang tinggal di daerah perburuan (Born Free UK, 2017). Sebagian besar pendapatan mereka masuk ke lembaga pemerintah, penjual pakaian dan individu yang berada di ibu kota negara dan luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa perburuan trofi tidak memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat lokal di sekitar wilayah perburuan. Beberapa organisasi perburuan trofi justru menawarkan penghargaan untuk pemburu yang menggunakan busur dan anak panah, pistol, atau senjata tradisional seperti tombak, dan metode lainnya yang sangat tidak memprioritaskan kesejahteraan dan hak bagi satwa liar. Adapun landasan dalam penelitian ini yakni paradigma post-kolonialisme dengan konsep yang digunakan yakni konsep

eurocentrisme. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan antroposentris atau *the instrumental approach*.

1.6.1. Post-kolonialisme

Dalam paradigma post-kolonialisme terdapat tiga elemen dasar hubungan internasional. *Pertama*, mengenai hakikat aktor internasional, post-kolonialisme memfokuskan pembahasannya pada dua aktor internasional yang merepresentasikan dua peradaban berbeda yakni Barat dan non-Barat. Post-kolonialisme tidak terlalu memandang siapa aktornya, karena yang paling penting adalah peradaban mana yang mereka wakili atau pilih. Singkatnya, hal yang terpenting adalah corak gagasan yang dibawanya. *Kedua*, mengenai konsep kepentingan nasional yang mengacu pada dikotomi antara Barat dengan non-Barat dalam menafsirkan apa kepentingan yang diusung tiap-tiap aktor internasional. Didasari oleh adanya dua aktor, maka kepentingannya pun hanya ada dua, yakni menyebarluaskan cara pandang Barat yang bersifat eurosentris atau sebaliknya mengkonter hegemoni Eurosentrisme tersebut. *Ketiga*, konsep struktur internasional berupa politik dunia yang bersifat hierarkis di mana Barat berada dalam posisi superior dibandingkan dengan non-Barat. Bukan hanya superior, tetapi juga memosisikan diri sebagai pihak yang dapat mengendalikan non-Barat karena merasa ditakdirkan sebagai suri tauladan. Lebih dari itu, Barat juga merasa memiliki tanggungjawab global untuk menyebarluaskan nilai-nilainya ke seluruh dunia karena merasa memiliki nilai yang universal (Rosyidin, 2020:171). Berkaca dari tiga elemen dasar tersebut, dapat terlihat jika Barat bukan hanya memperlihatkan letak semata. Namun, juga berupa ide dan identitas yang terbalut

oleh kepercayaan dan fantasi. Kekuasaan Barat atas non-Barat tidak hanya dapat terlihat secara fisik saja tetapi juga melalui penguasaan terhadap pengetahuan yang terbangun atas asumsi bahwa perkembangan yang terjadi di Barat merupakan sesuatu yang unik dan telah melalui sejarah panjang yang tidak terdapat di peradaban lain.

Salah satu tokoh yang menjadi akar pemikiran bagi post-kolonialisme adalah Edward Said. Hal ini didasari oleh buku karyanya yang berjudul *Orientalisme* yang sebenarnya menelaah sastra Barat yang dianggap bias. Dalam penjelasannya, orientalisme bukanlah sebuah istilah yang mengacu pada kondisi geografis, tetapi menjadi sebuah cara pandang di mana Barat sangat mendominasi, merestrukturisasi dan memegang kendali atas Timur. Menurut Said (1979:21), *“There is no such thing as a delivered presence, but a re-presence, or a representation”*. Pendapat ini menjelaskan bahwa pengetahuan Barat akan Timur semata-mata hanya sebuah representasi atau bentuk pemaknaan dari Barat yang kemudian dibalut dengan medium Bahasa. Dalam bukunya, Said (1979:6-7) menjabarkan mengenai tiga ciri khas pemikiran dari post-kolonialisme dalam konsep orientalisme. *Pertama*, Timur adalah gagasan tentang sejarah dan pemikiran yang telah memberikan gambaran bagi Barat. Singkatnya, kemunculan gagasan dan citra mengenai Barat dilatarbelakangi oleh adanya citra mengenai Timur. *Kedua*, adanya hubungan antara Barat dan Timur yang berupa kekuasaan, dominasi dan hegemoni. Hal ini didasari oleh narasi yang semakin membesar dan telah membawa anggapan bahwa Barat adalah penguasa dan Timur adalah pihak yang terjajah. *Ketiga*, orientalisme menjadi penanda kekuasaan Eropa atas non-Eropa. Seperti

narasi-narasi yang telah ada sebelumnya yang menyatakan bahwa Eropa adalah superior dibandingkan lainnya. Iliia Xypolia (2016:4) juga menjelaskan bahwa “*Orientalism creates a stereotypical image according to which the West is seen as being essentially rational, developed, humane, superior, and authentic, while the East is seen as irrational, aberrant, backward, crude, inferior, and inauthentic*”. Sehingga hal ini dapat berkontribusi pada pembangunan sistem hegemonik yang telah dirancang untuk mendominasi Timur dan mempromosikan imperialisme Barat.

Dalam paradigma post-kolonialisme terdapat beberapa konsep yakni *double consciousness*, *eurocentrism*, *hybridity*, dan *mimicry*. Konsep-konsep tersebut memiliki pengertian yang berbeda-beda. Sesuai dengan penelitian yang dijalankan, maka penulis menggunakan konsep *eurocentrism* dalam mempermudah penelitian. Sama halnya dengan orientalisme, kemunculan *eurocentrism* juga didasari oleh prasangka yang mendistorsi teori sosial karena telah menyangkal yang lain demi melanggengkan ideologinya yakni Barat. *Eurocentrism* merupakan cara pandang yang lahir dari Eropa yang kental dengan kepentingan atau keuntungan Eropa dan keturunannya atas belahan dunia lain dan menjustifikasi cara pandang ini dengan paradigma atau norma etika yang mereka klaim bermanfaat bagi semua umat manusia (Abidin & Amin, 2018:90). Sebutan *eurocentrism* atau *western-centrism* bukan merepresentasikan semua negara yang secara geografis berada dalam wilayah Eropa saja, tetapi hanya negara-negara tertentu seperti Eropa Barat Laut meliputi Inggris, Perancis, Jerman, Belanda dan Belgia, Eropa Selatan meliputi Spanyol dan Portugal, Amerika Utara yang berupa AS dan Kanada, serta negara

lainnya seperti Australia dan Selandia Baru. Dalam artikel Sarah N.R. Wijesinghe, dkk (2019:180), dijelaskan bahwa:

“Eurocentrism created binary views of the world and its people, which we have gradually internalised and to a certain extent accepted as true – ‘superior’ and ‘inferior’, ‘developed’ and ‘developing’, ‘first world’ and ‘third world’, ‘modern’ and ‘primitive’”

Istilah-istilah tersebut telah memiliki arti tersendiri selama bertahun-tahun berdasarkan pandangan prasangka dari penjajah dan telah menghasilkan apa yang disebut sebagai wacana dominasi. Adanya narasi besar mengenai kebangkitan peradaban Barat juga telah menghubungkan kesuksesan Eropa dengan nilai-nilai budaya, institusi sosial dan praktik politik (Xypolia, 2016:3). *Eurocentrism* menjadi pandangan bagi dunia yang mana telah lama dibuat oleh dominasi kapitalisme Barat dengan mengklaim budaya Eropa sebagai manifestasi unik dan progresif.

Dalam penelitian ini, *trophy hunting* dipandang luas sebagai kegiatan post-kolonialisme. Hal ini sejalan dengan pendapat Frantz Fanon yang mengatakan bahwa kolonialisme telah menciptakan proses “internalisasi” dalam diri kaum terjajah sehingga terbentuk inferioritas rasial dan kultural yang merasuk ke dalam kesadaran diri (Putranto, 2011:316). Sama seperti Fanon, Homi K. Bhabha turut memberikan argumennya mengenai lingkungan kolonial yang tidak sama seperti yang lainnya. Menurut Bhabha (1994:116), *“the relationship between colonizer and colonized is complex and nuanced...principally because the circulation of contradictory patterns of psychic affect in colonial relations (desire for, as well as fear of the other, for example) undermines their assumption that the identities and positioning of colonizer and colonized exist in stable and unitary terms...the colonial relationship is structured (on both sides) by forms of ‘multiple and*

contradictory belief”. Jadi hubungan antara penjajah dan terjajah tetaplah diwarnai dengan adanya kontradiktif dan tidak ada hubungan yang stabil. Berdasarkan hal inilah, maka teori post-kolonialisme itu sangat berkaitan erat dengan adanya konsep persepsi, heuristik dan *stereotype*. Terlebih lagi tema kunci dari teori ini adalah persepsi Barat tentang non-Barat adalah hasil warisan penjajahan dan imperialisme Eropa. Setiap wacana yang ada baik itu tertulis ataupun ucapan telah membangun negara dan masyarakat non-Barat sebagai orang yang berbeda dengan Barat atau terlihat lebih rendah. Hal ini juga diperjelas oleh Bhabha (1994:66) yang menyatakan bahwa *“The stereotype...is a form of knowledge and identification that vacillates between what is always ‘in place’, already known, and something that must be anxiously repeated...as if the essential duplicity of the Asiatic or the bestial sexual license of the African that needs no prove can never really, in discourse be proved”*. Berdasarkan sejarah yang ada, sejak tahun 1890, penduduk Afrika di Zimbabwe telah mengalami keterasingan yang diperparah dengan kemunculan kolonialisme kaum kulit putih yakni kaum Rhodesian yang menjadi penjaga hutan. Sejarah ini membawa masyarakat Afrika khususnya Zimbabwe melihat perburuan sebagai bagian tak terpisahkan dari warisan budaya Afrika dan telah mempercayai anggapan bahwa pemerintah kolonial yakni Barat lebih menghargai hewan daripada manusia (Easton, 2017).

Benih-benih rezim kebenaran dalam konservasi alam di negara berkembang telah menyebar di awal abad kesembilan belas dengan kombinasi gagasan yang baik tentang alam yang diilhami oleh tulisan para filsuf lingkungan seperti Thoreau dan Muir dan dioperasionalkan oleh pendukung imperium

kehutanan di Amerika Serikat dan koloni Eropa. Terlebih lagi dengan dibangunnya citra dan pendanaan yang gigih melalui USAID, kaum Barat mampu menjajah kembali Zimbabwe bersamaan dengan pemberian kendali atas populasi dan sumber daya, yang mana sangat mirip dengan taktik penjajahan awal. Keyakinan ini telah mencerminkan bagaimana pendapat Fanon pada kolonialisme dapat berjalan. Kegiatan *trophy hunting* bukan hanya semata memaksakan aturan kolonial kepada masyarakat jajahan. Dengan sebuah logika manipulatif, kegiatan ini telah memasuki masyarakat Afrika agar dapat bertahan ditengah isu negatif demi kesenangan semata.

1.6.2. Pendekatan Antroposentris

Persoalan mengenai perilaku manusia terhadap alam baik itu dampak maupun hubungan manusia dengan keseluruhan komponen alam telah tercantum dalam etika lingkungan. Dalam menerapkan etika lingkungan tersebut harus memperhatikan empat hal, yaitu (Hudha & Rahardjanto, 2018:65):

1. Manusia sebagai bagian dari lingkungan merupakan pelaku utama dalam pengelolaan lingkungan, sehingga perlu menyayangi semua kehidupan dan lingkungannya selain dirinya sendiri;
2. Manusia sebagai bagian dari lingkungan merupakan pelaku utama dalam pengelolaan lingkungan, sehingga harus selalu berupaya untuk menjaga kelestarian, keseimbangan, dan keindahan alam;
3. Kebijakan penggunaan sumber daya alam terbatas, misalnya energi;
4. Lingkungan disediakan untuk semua makhluk hidup, bukan untuk manusia saja.

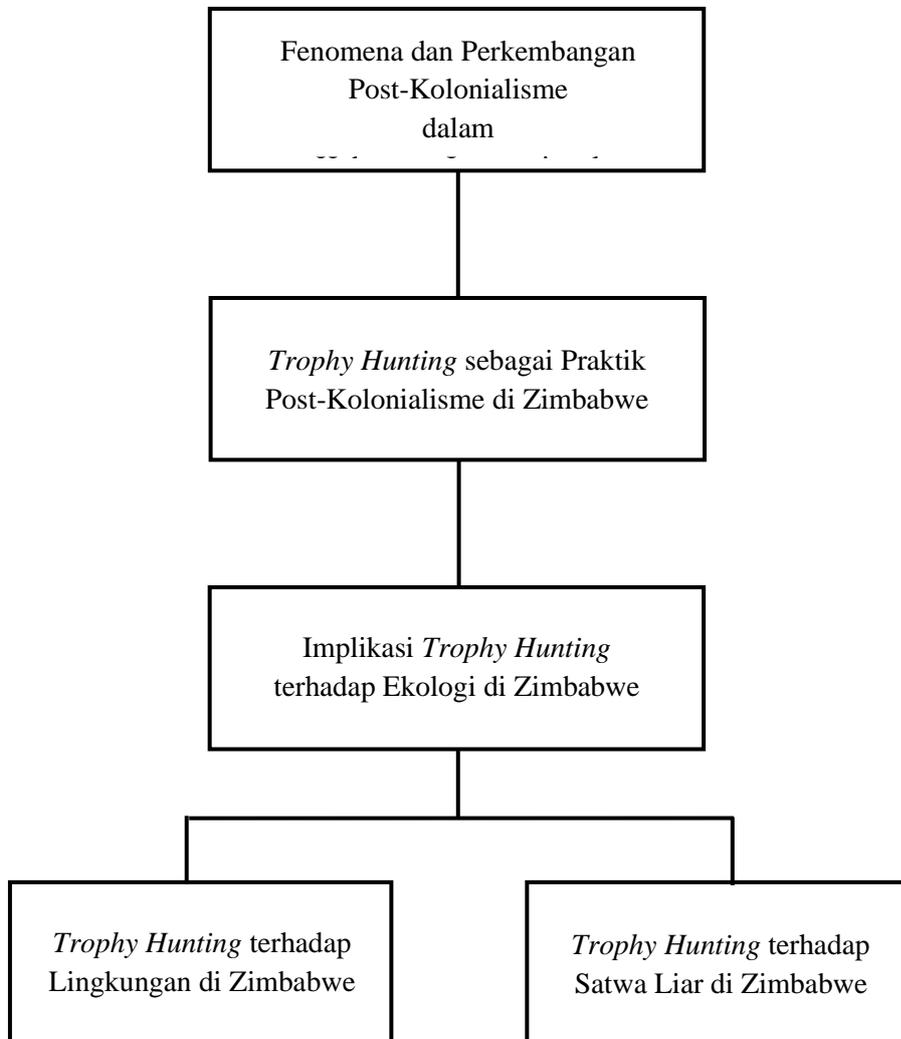
Untuk dapat mempermudah dalam memperhatikan keempat hal tersebut, maka etika lingkungan tersebut dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu *the instrumental approach*, *the axiological approach*, dan *the anthropological approach*. Dari pendekatan-pendekatan tersebut, penulis memfokuskannya pada *the instrumental approach* yang mana merupakan sebuah pendekatan antroposentris yang memandang bahwa alam sebagai *sense* yang hanya memiliki nilai instrumental bagi umat manusia (Hudha & Rahardjanto, 2018:65). Dengan kata lain, pendekatan ini telah memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta baik kebutuhan maupun kepentingan manusia telah menjadi nilai paling tinggi dan penting. Maka dari itu, Keraf (2010:47-48) mengatakan bahwa segala tuntutan yang ada mengenai tanggung jawab manusia terhadap lingkungan hidup dianggap sebagai tuntutan yang berlebihan, tidak relevan, dan tidak pada tempatnya.

Aristoteles juga menjadi salah satu filsuf yang memiliki peran penting dalam pendekatan ini. Hal ini dapat dilihat dalam bukunya yang berjudul *The Politics*. Dalam buku tersebut, Aristoteles (1986:79) mengatakan bahwa “Tumbuhan disiapkan untuk kepentingan binatang, dan binatang disediakan untuk kepentingan manusia”. Berdasarkan argumen tersebut, dapat terlihat bahwa setiap makhluk ciptaan yang memiliki posisi paling rendah dimaksudkan untuk kepentingan makhluk ciptaan yang lebih tinggi posisinya. Sehingga bagi makhluk ciptaan yang lebih tinggi dapat menggunakan semua hal yang ada di muka bumi, demi memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Hal ini juga memperlihatkan adanya rangkaian urutan dari yang lemah hingga yang memiliki kendali lebih besar.

Argumen mengenai pendekatan ini juga diperkuat dengan pendapat bahwa manusia merupakan “aristokrat biologis” (Keraf, 2010:57). Sebutan tersebut mengartikan manusia sebagai makhluk yang mempunyai kekuasaan atas makhluk hidup lain, atau dengan kata lain bahwa manusia memiliki posisi paling istimewa di alam semesta ini. Sehingga, manusia harus bisa melayani semua yang berada di bawah kekuasaannya secara baik dan sekaligus mempunyai tanggung jawab moral untuk dapat menjaga sekaligus melindunginya. Jadi, pendekatan antroposentris ini sendiri tidak salah karena menempatkan manusia pada posisi yang mengharuskannya bertanggung jawab secara khusus terhadap seluruh isi alam semesta. Pendekatan ini dikatakan salah pada penerapannya yang mana hanya melihat nilai superioritas pada posisi manusia seakan dengan hal tersebut, manusia dapat leluasa menggunakan seisi alam semesta secara sewenang-wenang.

Gambar 1.1

Bagan Skema Alur Pikir Penelitian



1.7. Operasionalisasi Konsep

1.7.1. Definisi Konseptual

Didasarkan dari pendapat para ahli yang telah dipaparkan dalam sub bab kerangka pemikiran serta dengan menyesuaikan pada kebutuhan penelitian ini, maka definisi konseptual yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Perburuan

Secara umum, berburu diartikan sebagai sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengejar dan membunuh hewan atau binatang buas terutama untuk makanan ataupun bentuk olahraga. Hal ini sejalan dengan sejarah manusia yang mana merupakan makhluk yang dapat memakan tumbuhan dan hewan apa saja yang mereka temukan atau omnivora. Alat yang paling awal diketahui manusia juga adalah alat berburu seperti panah, ujung tombak, pengikis. Selama sekitar satu juta tahun manusia telah melakukan kegiatan berburu, membunuh dan memakan mangsa. Buku yang berjudul "*Meditations on Hunting*" karya Jo & Ortega y Gasset menjadi salah satu buku yang penting dalam hal berburu. Dalam bukunya, Ortega memberikan definisi formal mengenai berburu yakni "*Hunting is what an animal does to take possession, dead or alive, of some other being that belongs to a species basically inferior to its own*" (Wood, 1997). Namun pengertian ini justru banyak dipertanyakan karena tidak selamanya yang lemah menjadi mangsa. Ortega juga menambahkan dua kualifikasi mengenai berburu. *Pertama*, hewan yang diburu memiliki kesempatannya. *Kedua*, tidak penting bagi

pemburu untuk berhasil. Bahkan, Ortega juga memberikan definisi lain yang mana berburu adalah cara hidup.

2. Trophy Hunting

Menurut *International Fund for Animal Welfare* (IFAW), kegiatan *trophy hunting* merupakan salah satu bentuk perburuan yang tujuan eksplisitnya adalah untuk mendapatkan bangkai atau bagian tubuh dari binatang buruan tersebut yang digunakan sebagai piala pelambang keberhasilan berburu (Casamitjana & Tsang, 2016). Trofi yang didapatkan seperti tanduk, tengkorak, kulit, taring dan bagian tubuh hewan lainnya digunakan sebagai hiasan bagi pemburu ataupun dijual kembali. Beberapa trofi tersebut berasal dari hewan langka atau terancam punah yang banyak diburu di negara-negara Afrika, sebagian Asia dan Amerika Selatan. Secara spesifik, kegiatan ini berlangsung di sebagian besar negara di Eropa, AS, Kanada, Meksiko, beberapa negara di Asia Timur, Tengah dan Selatan, sekitar setengah dari negara di Afrika, beberapa negara di Amerika Tengah dan Selatan, dan di Australia dan Selandia Baru. Perburuan trofi menjadi kegiatan yang legal di beberapa negara dan diatur di bawah program yang dilaksanakan oleh badan pemerintah margasatwa, pengelola kawasan lindung, badan masyarakat adat dan lokal, pemilik tanah swasta atau organisasi konservasi dan pembangunan.

3. Hak-Hak Satwa Liar

Jika membahas mengenai hak-hak terhadap satwa liar maka memiliki pembahasan yang sama dengan *animal rights*. Para penganut filosofi ini

meyakini empat hal dasar. *Pertama*, setiap hewan harus diberikan hak dasar yang sama seperti halnya dengan manusia. *Kedua*, setiap hewan harus hidup bebas dari rasa sakit dan penderitaan yang disebabkan oleh manusia. *Ketiga*, hewan tidak boleh dieksploitasi untuk tujuan manusia mana pun. *Keempat*, setiap hewan memiliki status yang sama terlepas dari kesamaan atau kelangkaannya (The Wildlife Society, 2016). Sama halnya dengan *animal rights*, hak atas satwa liar juga memiliki elemen yang mencakup hak tersebut yakni: (1) individu dan spesies satwa liar adalah pemegang hak, (2) tindakan manusia dibatasi oleh hak-hak ini, (3) satwa liar dan habitatnya adalah “res” dari hak tersebut, dan (4) manusia dan lembaganya memiliki kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Dari beberapa elemen tersebut, memunculkan tiga hak satwa liar yang harus dipenuhi, yakni (Favre, 1978):

a) *Property Interest*

Penggunaan lahan bagi satwa liar sama pentingnya dengan manusia yang digunakan untuk kelangsungan hidup seperti mencari makanan, kawin, dan aktivitas khas spesies lainnya. Wilayah yang sangat penting bagi ekosistem, satwa liar dan pelestarian habitat akan menjadi prioritas yang tidak dibatasi oleh manusia.

b) *Individual Rights*

Pemberian hak individu terhadap satwa liar menjadi fungsi dari cara manusia memandang kepentingan hewan. Sebagian besar peneliti juga mempertimbangkan hak ini untuk disetujui karena penderitaan yang ditimbulkan manusia pada satwa liar harus dihilangkan.

c) *Species Rights*

Hak ini berkenaan dengan status satwa liar baik itu terancam atau hampir punah. Bagi spesies yang berada dalam status tersebut, maka tidak diperbolehkan untuk diburu dengan tujuan apapun. Jika terdapat individu atau kelompok yang percaya pembunuhan spesies berstatus terancam atau hampir punah diperbolehkan demi kelangsungan hidup manusia, maka pemerintah berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mencari sumber alternatif.

4. Ekologi Satwa Liar

Ekologi satwa liar menjadi disiplin ilmu terapan di *University of Wisconsin Madison* dengan Aldo Leopold sebagai pengembangan program akademik. Ekologi satwa liar adalah ilmu di balik praktik pengelolaan satwa liar yang berupaya mengelola populasi satwa liar untuk kepentingan manusia (Boyce, n.d.). Namun, pada dasarnya ekologi satwa liar adalah subdisiplin biologi konservasi yang sebagian besar berfokus pada ekologi terapan dan pengelolaan populasi satwa liar. Sebagai cabang ilmu yang berhubungan timbal balik antara satwa liar dengan spesies lain dan lingkungan sekitar, ekologi satwa liar memiliki konsep yang mencakup (DNR Maryland.gov, 2015):

- a) Habitat,
- b) Suksesi tanaman dan pengaruhnya terhadap satwa liar,
- c) Tepi dan kontras,
- d) Rantai dan jaring makanan,

- e) Komunitas dan ekosistem,
- f) Kekayaan dan keanekaragaman spesies,
- g) Seleksi alam dan adaptasi,
- h) Dinamika populasi satwa liar, serta
- i) Keanekaragaman hayati.

5. Post-kolonialisme

Post-kolonialisme telah menjadi istilah yang menyebar luas dalam studi tentang efek samping yang bertahan lama dari pemerintahan kolonial dan nekropolitik serta elit pasca kemerdekaan. Pasca Perang Dunia II, para sejarawan menjadikan istilah "*post-colonial*" bermakna kronologis yang menunjukkan periode pasca kemerdekaan. Namun, sejak akhir 1970-an istilah tersebut digunakan oleh para kritikus sastra untuk membahas dampak budaya dari penjajahan (Ashcroft, Griffiths, & Tiffin, 2013). Pada perkembangannya, konsep post-kolonialisme tetap menekankan pada penolakan pemikiran umum Barat yang tersebar di seluruh dunia. Menurut Jacques Derrida, "*Western thought is based on dichotomies such as being / absence, identity / difference, domestic / international, and not being understood without the opposite one*" (Ari & AK, 2019). Kunci utama post-kolonialisme adalah adanya persepsi Barat tentang non-Barat yang berasal dari hasil warisan penjajahan dan imperialisme Eropa. Fanon juga menjelaskan bahwa kaum kulit hitam dibuat untuk mempercayai inferioritasnya dengan penjajah kulit putih melalui aspek psikologis penjajahan, seperti pemaksaan bahasa, budaya, agama dan sistem

pendidikan (Nair, 2017). Dengan kata lain, kolonialisme telah menciptakan proses internalisasi yang memudahkan penjajah untuk membenarkan dan mempertahankan aturan mereka.

6. Eurocentrism

Eurocentrism merupakan cara pandang yang lahir dari Eropa yang kental dengan kepentingan atau keuntungan Eropa dan keturunannya atas belahan dunia lain dan menjustifikasi cara pandang ini dengan paradigma atau norma etika yang mereka klaim bermanfaat bagi semua umat manusia (Abidin & Amin, 2018). Sebutan *eurocentrism* atau *western-centrism* bukan merepresentasikan semua negara yang secara geografis berada dalam wilayah Eropa saja, tetapi hanya negara-negara tertentu seperti Eropa Barat Laut meliputi Inggris, Perancis, Jerman, Belanda dan Belgia, Eropa Selatan meliputi Spanyol dan Portugal, Amerika Utara yang berupa AS dan Kanada, serta negara lainnya seperti Australia dan Selandia Baru.

7. Antroposentris

Mendasari definisi yang diberikan oleh Hudha & Rahardjanto dalam kerangka pemikiran, penulis menyimpulkan bahwa antroposentris merupakan salah satu pendekatan yang termasuk dalam etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat dari alam semesta. Manusia dan kepentingannya menjadi hal yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang berkaitan dengan alam.

1.7.2. Definisi Operasional

Berdasarkan definisi konseptual yang telah dijelaskan sebelumnya, maka definisi operasional diturunkan sebagai berikut:

1. Perburuan

Penelitian ini menekankan perburuan yang menjadi sebuah budaya yang melekat di Barat. Dengan demikian untuk mendapatkan data-data terkait hal tersebut, dirumuskan definisi operasionalnya sebagai berikut:

- a. Mempertanyakan mengenai bagaimana budaya berburu yang melekat di Barat.
- b. Mempertanyakan mengapa kaum Barat lebih menyukai berburu di wilayah Afrika khususnya Zimbabwe.
- c. Mempertanyakan seperti apa perkembangan budaya berburu di kalangan orang Barat.

2. Trophy Hunting

Trophy hunting dalam penelitian ini digunakan sebagai instrument dalam mewujudkan hasrat berburu di kalangan Barat. Dengan demikian data yang perlu diketahui adalah:

- a. Mempertanyakan siapa saja aktor yang terlibat dalam kegiatan *trophy hunting* yang dilakukan di Afrika khususnya Zimbabwe.
- b. Mempertanyakan bagaimana *trophy hunting* masih eksis di kalangan para pemburu.

- c. Mempertanyakan mengapa kegiatan *trophy hunting* masih banyak terjadi di Afrika khususnya Zimbabwe meskipun telah banyak kajian yang mengatakan bahwa kegiatan tersebut menimbulkan kerusakan.

3. Hak-Hak Satwa Liar

Penelitian ini menggunakan hak-hak satwa liar untuk membantu menjelaskan kemungkinan adanya dampak buruk *trophy hunting*. Dengan demikian data yang perlu diketahui adalah:

- a. Mempertanyakan apa saja hak-hak yang perlu didapatkan oleh satwa liar di dunia.
- b. Mempertanyakan tentang bagaimana cara dalam memenuhi hak-hak satwa liar tersebut.
- c. Mempertanyakan mengenai pentingnya pemenuhan hak-hak satwa liar tersebut.

4. Ekologi Satwa Liar

Adanya hak-hak satwa liar dapat membantu melihat bagaimana ekologi satwa liar yang seharusnya dijaga. Dengan demikian data yang perlu diketahui adalah:

- a. Mengetahui bagaimana ekologi satwa liar yang baik untuk dijaga.
- b. Mengetahui bagaimana *trophy hunting* dapat mempengaruhi ekologi satwa liar di Zimbabwe.
- c. Mengetahui bagaimana upaya yang perlu dilakukan untuk mengembalikan ekologi satwa liar ke dalam keadaan yang baik.

5. Post-kolonialisme

Post-kolonialisme dijadikan sebagai salah satu hal yang perlu ditekankan dalam penelitian ini. Dengan demikian data yang perlu diketahui adalah:

- a. Mengetahui apa yang dimaksudkan sebagai post-kolonialisme.
- b. Mengetahui bagaimana kegiatan *trophy hunting* dapat menjadi kegiatan post-kolonialisme.

6. Eurocentrism

Dalam penelitian ini, *eurocentrism* juga menjadi konsep yang perlu ditekankan. Dengan demikian data yang perlu diketahui adalah:

- a. Mengetahui apa yang dimaksudkan sebagai *eurocentrism*.
- b. Mengetahui bagaimana kegiatan *trophy hunting* berhubungan dengan konsep *eurocentrism*.
- c. Mengetahui apa saja yang menjadi penilaian kegiatan *trophy hunting* dikatakan sebagai wujud *eurocentrism*.

7. Antroposentris

Dalam penelitian ini, antroposentris menjadi pendekatan yang penting dalam membantu melihat kerusakan ekologi yang ada. Dengan demikian data yang perlu diketahui adalah:

- a. Mengetahui apa yang dimaksudkan sebagai antroposentris.
- b. Mengetahui bagaimana keterkaitan antara antroposentris dengan kegiatan *trophy hunting*.

1.8. Argumen Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah *trophy hunting* sebagai sebuah kegiatan yang digemari oleh orang Barat telah dipandang sebagai bentuk praktik

postkolonialisme di negara-negara Afrika khususnya Zimbabwe. Hal ini juga didasari karena kegiatan tersebut tetap terjaga dan terlihat eksklusif memberikan akses pada orang Barat atas megafauna Afrika. Selain itu, adanya penilaian positif yang dikembangkan oleh orang Barat dan organisasi perburuan atas kegiatan *trophy hunting* yang berkontribusi pada konservasi telah memperlihatkan adanya bentuk-bentuk eurosentrisme yang berupa bentuk halus dominasi, eksploitasi dan kendali atas wilayah bekas kolonial. Legalnya kegiatan ini juga menjadi wujud antroposentris yang mana kepentingan dan kebutuhan manusia menjadi hal terpenting daripada dampak kerusakan ekologi satwa liar yang dihasilkan dari kegiatan *trophy hunting* di Zimbabwe.

1.9. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data yang disesuaikan dengan keadaan di lapangan dan menekankan perhatian pada proses. Menurut Denzin dan Lincoln, "*Qualitative researchers study things in their natural settings, attempting to make sense of, or interpret, phenomena in terms of the meanings people bring to them*" (Merriam, 2009). Hal ini dapat diartikan bahwa penelitian kualitatif berusaha mempelajari berbagai hal atau fenomena di dunia dalam lingkungan yang alami dan berusaha mendapatkan pemahaman tentang segala hal atau fenomena tersebut berdasarkan pemaknaan dari orang yang terlibat di dalamnya. Metode penelitian kualitatif ini tidak melibatkan perhitungan atau uji statistik tertentu. Strauss dan Corbin juga berpendapat bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur statistik atau cara-cara

lain dari kuantifikasi (pengukuran) (Creswell, 1998). Penggunaan metode penelitian kualitatif sendiri dalam penelitian ini bertujuan untuk membantu penulis dalam melihat dan memahami lebih lanjut mengenai bagaimana kontribusi *trophy hunting* yang merupakan bentuk poskolonialisme telah menyebabkan kerusakan ekologi satwa liar di Zimbabwe.

1.9.1. Tipe Penelitian

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif, maka penulis memilih tipe penelitian deskriptif analisis. Cooper dan Emory mengatakan bahwa tipe penelitian deskriptif sangat menuntut kemampuan meneliti dan standar yang tinggi serta lebih ideal dibandingkan penelitian penjelasan baik yang menyangkut desain maupun pelaksanaannya (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018). Penelitian deskriptif analitis memusatkan perhatiannya pada masalah atau fenomena sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan yang mana hasilnya kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

1.9.2. Situs Penelitian

Secara sederhana, situs penelitian merupakan suatu tempat dimana peneliti menangkap dan mengamati keadaan sebenarnya dari objek yang ditelitinya guna memperoleh data atau informasi yang diperlukan dalam penelitiannya. Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis menetapkan situs penelitiannya di Indonesia dengan melakukan studi mengenai kegiatan *trophy hunting* di Zimbabwe.

1.9.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan individu dan atau kelompok yang diharapkan dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Dalam penelitian ini, subjek yang dijadikan sebagai sampel penelitian adalah negara Zimbabwe dan perburuan satwa liar serta *trophy hunting* di Zimbabwe.

1.9.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan metode penelitian yang telah dipilih yakni data kualitatif (non-numerik atau non-angka). Jenis data ini berupa analisis kondisi dari situs dan subjek penelitian dalam bentuk kata-kata tertulis, kalimat, foto, ataupun pernyataan subjek penelitian.

1.9.5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang diperoleh melalui buku, artikel jurnal, artikel online, koran dan majalah dengan tetap mempertimbangkan sumber yang kredibel dan terpercaya serta tetap berkaitan dengan topik penelitian, seperti jurnal-jurnal yang telah terakreditasi SCOPUS dan SINTA.

1.9.6. Teknis Pengumpulan Data

Dalam mempermudah penelitian, penulis melakukan studi kepustakaan (*desk research*). Studi kepustakaan ini digunakan peneliti untuk menggali data sekunder mengenai beberapa hal yang relevan dengan topik penelitian, baik dari buku yang membahas mengenai sejarah *trophy hunting* di Afrika, terutama

Zimbabwe, maupun artikel ilmiah, jurnal dan berita-berita mengenai kegiatan *trophy hunting* yang berkontribusi bagi kerusakan ekologi di Zimbabwe. Penggunaan beberapa media massa dapat digunakan untuk mengungkapkan fakta yang terjadi daripada fakta yang bersifat subjektif apabila hanya menerima dari satu sumber saja.

Kemudian untuk menjawab rumusan masalah yang ada, penulis mengumpulkan data-data yang dapat mengungkapkan fakta yang terjadi sebenarnya. Setelah itu, diadakan indentifikasi atas tahapan-tahapan yang disebut sebagai proses. Hingga pada akhirnya, tahapan tersebut secara berkelanjutan dapat menjadi sebuah penjelasan yang menarik bagi pembaca.

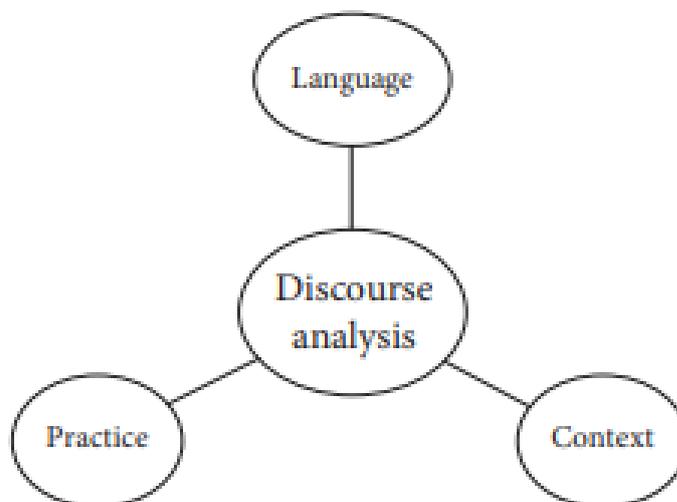
1.9.7. Analisis dan Interpretasi Data

Dalam memudahkan penulis ketika menganalisis dan memperoleh kesimpulan, maka penelitian ini menggunakan teknik analisis data *discourse analysis*. Teknik ini merupakan salah satu metode penelitian kualitatif yang dapat digunakan untuk meneliti atau menganalisis sebuah dokumen yang mana dapat berupa teks, gambar, simbol, pidato, percakapan dan sebagainya. Diskursus atau wacana sendiri secara sederhana merupakan sebuah cara bagaimana realitas sosial di konstruksi oleh aktor tertentu (Rosyidin, 2019). *Discourse analysis* tidak berupaya untuk membahas hubungan sebab akibat atau menjelaskan (*explaining*) melainkan berupaya menjawab pertanyaan bagaimana mungkin atau pemahaman (*understanding*). Teknik ini mempermudah penulis dalam melihat perkembangan perburuan satwa liar di Zimbabwe.

Dalam sebuah buku yang berjudul *The Discourse Studies Reader, Main Currents in Theory and Analysis* karya Johannes Angermuller, Dominique Maingueneau dan Ruth Wodak dikatakan bahwa “*Discourse analysis, therefore, needs to deal with at least three ‘components’: a language, a practice and a context component. In this view, discourse emerges from the interplay of these three components*”, yang berarti bahwa antara bahasa, praktik dan komponen konteks harus diakui dan diintegrasikan secara baik (Angermuller, Maingueneau, & Wodak, 2014).

Gambar 1.2

The triangle of discourse analysis: language, practice, context



Sumber: Angermuller, Maingueneau, & Wodak, 2014

Dalam gambar di atas, ‘*Language*’ menunjukkan materi semiotik (pola formal, konvensi, sumber) yang mana diartikan secara luas terdiri dari teks tertulis dan lisan maupun data baik itu audio visual seperti gambar atau film yang diperlukan untuk membangun pengetahuan tentang konteks yang lebih luas. ‘*Practice*’ mengacu pada cara-cara yang digunakan untuk memproses bahasa yang

telah didapatkan. '*Context*' mengacu pada pengaturan, situasi atau pengetahuan yang tersedia untuk teks kontekstual wacana. Bahasa berada pada posisi awal karena telah menjadi sebuah mesin yang membentuk dunia sosial. Sehingga secara implikasi, perubahan wacana berakibat pada perbuahan realitas sosial.

1.9.8. Kualitas Data

Kualitas data merupakan level data untuk mengetahui sejauh mana data yang diperoleh selama penelitian berlangsung dapat memenuhi syarat seperti akurat, lengkap, terbaru, konsisten, valid dan reliable sesuai dengan yang dibutuhkan, sehingga data tersebut dapat dikatakan berkualitas dan menjadi acuan terpercaya dalam proses penelitian. Dalam data sekunder, kredibilitas data yang diperoleh dilakukan dengan mengumpulkan jurnal nasional dan international baik yang terakreditasi oleh SCOPUS maupun SINTA. Kualitas data ini dapat diperoleh melalui model triangulasi.

Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat membandingkan informasi yang telah didapatkan sama dengan berbagai pihak agar terdapat dukungan dari data yang dibuktikan. Selain itu, metode ini juga dapat mengantisipasi apabila terjadi bahaya subyektifitas. Metode tringulasi ini dapat dilakukan dengan cara *check*, *re-check*, dan *cross-check* (Nasution, 2003).

- a. *Check* yang mana dalam hal ini dilakukan pengecekan kebenaran data dengan membandingkannya pada data dari sumber lain.
- b. *Re-check* yang mana dilakukan dengan mengulang kembali informasi yang diperoleh melalui sumber data, metode, dan waktu

- c. *Cross-check* yang mana dilakukan melalui kegiatan *checking* pada metode pengumpulan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang selanjutnya dipadukan dengan observasi lebih lanjut.

1.9.9. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka pemikiran teoritis, operasionalisasi konsep, argument penelitian, serta metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, situs penelitian, subjek penelitian, jenis data, sumber data, jangkauan penelitian, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Pada bab ini berisi mengenai deskripsi atau gambaran singkat terkait dengan perburuan hewan dalam perjanjian internasional, perkembangan *trophy hunting* di Afrika, kasus *trophy hunting* dan keadaan lingkungan di Zimbabwe.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bagian ini penulis menganalisis *trophy hunting* sebagai bentuk post-kolonialisme di Zimbabwe yang mana meliputi perkembangan postkolonialisme dalam Hubungan Internasional, dampak *trophy hunting* terhadap ekosistem di Zimbabwe, respon pemerintah Zimbabwe terkait isu *trophy hunting* hingga kerjasama internasional dalam menangani *trophy hunting* di Zimbabwe.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memberikan kesimpulan, saran atau rekomendasi penulis untuk penelitian-penelitian selanjutnya dengan topik yang terkait. Selain itu, pada bab ini

juga diperoleh hasil penelitian apakah sesuai dengan argumentasi atau justru bertentangan.